

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2014). *Akuntansi Perpajakan. Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agustin, I. W., Apriliawati, Y., & Irawan, A. (2021). Pengaruh Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 271-279.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Andriyawan, D. (2020, Maret 3). *BPPD Kota Bandung Kejar Piutang PBB Rp 194 Miliar*. Retrieved November 22, 2021, from *Bisnis.com*: <https://bandung.bisnis.com/read/20200303/549/1208595/bppd-kota-bandung-kejar-piutang-pbb-rp194-miliar>
- Dahrani, & Ramdhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9-14. doi:<http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JPP>
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2018). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harmawati, N. A., & Yadnyana, I. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5.6, 1513-1542.
- Irwansah, & Akbal, M. (2016). Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar. 19-32. Retrieved November 2, 2021, from <https://ojs.unm.ac.id>
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2020). Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar PBB. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Pendidikan*, 7(2), 124-133. Retrieved from <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent>

LKIP PEMERINTAH KOTA BANDUNG. (n.d.). Retrieved November 2, 2021, from PPID Kota Bandung: <https://ppid.bandung.go.id>

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Muhrim, N. S. (2020). Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Para Wajib Pajak di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. *Hipotesa*, 14(1), 52-69.

Novelino, A. (2020, Juni 24). *Efek Corona, Bandung Seret Turun Target Pajak*. Retrieved November 22, 2021, from CNNIndonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200623183045-532-516626/efek-corona-bandung-seret-turun-target-pajak>

Pandiangan, L. (2007). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Pemerintah Kota Bandung Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014. (n.d.).

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (n.d.).

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (n.d.).

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1386 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah. (n.d.).

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. (n.d.).

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. (n.d.).

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah . (n.d.).

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. (n.d.).

- Permana, C. (2018, Juli 8). *Pendapatan Pajak Kota Bandung Tahun 2018 Ditargetkan Capai Rp 2,640 Triliun*. Retrieved November 22, 2021, from [tribunjabar.id: https://jabar.tribunnews.com/2018/07/08/pendapatan-pajak-kota-bandung-tahun-2018-ditargetkan-capai-rp-2640-triliun](https://jabar.tribunnews.com/2018/07/08/pendapatan-pajak-kota-bandung-tahun-2018-ditargetkan-capai-rp-2640-triliun)
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 142-151. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Prayatni, P. D., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Pemeriksaan Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17.1, 663-689.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Puspita, E. (2016). Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 1(1), 1-8.
- Putri, N. P., Tanno, A., & Kurniawan, R. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Benefita*, 4(2), 386-398.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmadiani, & Saepudin, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Warga dalam Membayar Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi)*, 13(1), 1-7.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus. Buku I Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rochaety, E. e. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Rosadi, D. (2018, November 9). *Piutang PBB Pemkot Bandung Capai Rp 800 Miliar*. Retrieved November 22, 2021, from [merdeka.com: https://m.merdeka.com/bandung/halo-bandung/piutang-pbb-pemkot-bandung-capai-rp-800-miliar-181109r.html](https://m.merdeka.com/bandung/halo-bandung/piutang-pbb-pemkot-bandung-capai-rp-800-miliar-181109r.html)
- Samsu. (2017). *METODE PENELITIAN: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pustaka Jambi.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Sari, N. Y., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26.1, 310-339. doi:<https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i01.p12>
- Serial Referensi Modernisasi dan Perbaikan Kebijakan Administrasi Perpajakan Pemerintah Daerah: Pengelolaan Piutang Pajak Daerah*. (2021, November 15). Retrieved from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/10/Trampil-2.pdf>
- Solehudin, M. (2019, September 26). *Penunggak Pajak di Kota Bandung Capai Rp 1 Triliun*. Retrieved November 22, 2021, from detiknews: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4723341/penunggak-pajak-di-kota-bandung-capai-rp-1-triliun>
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana. (2005). *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan . (n.d.).
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (n.d.).
- Usman, A. R., & Puspita, A. F. (2017). Pengaruh Penerapan Sunset Policy PBB Perkotaan Terhadap Kemauan Membayar Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Bekerja di Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Pajak, dan Kantor Jasa Penilai Publik di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1).
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia. Buku 2 Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak. Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.

- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., & Jusuf, A. A. (2018). *Pengantar Akuntansi 1. Adaptasi Indonesia. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, W. d. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960-970.